

Peran Digitalisasi Bisnis Terhadap Pemulihan Ekonomi dalam Meminimalisir Pengangguran di Indonesia

Moch. Sulchan¹, Maya Zulfa Maslihatin², Anik Yulikah³ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung <u>sulkhanmoch@gmail.com</u>

Abstract

Business digitization is a business transformation process from conventional to virtual concepts. By applying digital technology in business, it will be able to increase competitiveness and still be able to survive against the onslaught of technology. The policy of restricting the movement of community activities during the COVID-19 emergency has a direct impact on the economic sector. In the era of the digital industrial revolution 4.0, the government has a digital-based National Economic Recovery (PEN) program in the context of economic stimulus affected by the COVID-19 pandemic. This study aims to determine the role of business digitization in minimizing unemployment in Indonesia. This study uses a descriptive qualitative approach. The data obtained are secondary data from books and journals. Based on the research results, there is a very significant change in business digitization in the industrial era 4.0 where digital marketing strategies are more promising than conventional concepts.

Keywords: Business Digitization, Economic Recovery, Unemployment

Abstrak

Digitalisasi bisnis merupakan proses transformasi bisnis dari konsep konvensional menjadi virtual. Dengan menerapkan teknologi digital dalam bisnis, maka akan dapat meningkatkan daya saing dan tetap bisa bertahan melawan gempuran teknologi. Kebijakan pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat dalam masa darurat covid-19 sangat berdampak langsung pada sektor ekonomi. Dalam era *society* 5.0 pemerintah memiliki program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berbasis digital dalam rangka stimulus ekonomi yang terdampak pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran digitalisasi bisnis dalam meminimalisir pengangguran di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif data yang diperoleh yaitu data sekunder dari buku maupun jurnal. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan digitalisasi bisnis yang sangat signifkan pada era *society* 5.0 dimana *strategy marketing digital* lebih menjanjikan daripada konsep konvensional.

Keywords: Digitalisasi Bisnis, Pemulihan Ekonomi, Pengangguran

PENDAHULUAN

Digitalisasi bisnis adalah proses mengubah ide fisik menjadi ide virtual, yang mencakup proses transaksi serta pemasangan sistem perusahaan. Yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, meminimalkan penggunaan manusia, memberikan lebih banyak hasil, dan mencakup dunia. Dampak teknologi terhadap bisnis cukup signifikan karena berpotensi mengurangi pengangguran, misalnya dengan memfasilitasi transaksi ekonomi melalui *marketplace*. Salah satu metode paling sukses untuk menghadapi revolusi digital adalah digitalisasi bisnis pada era *society* 5.0. Konsep *society* 5.0 adalah untuk membangun masyarakat yang manusia-sentris ketika perkembangan ekonomi dan solusi atas permasalahan dapat diraih, serta setiap orang dapat menikmati hidup yang berkualitas. Dalam *society* 5.0 dimana komponen utamanya adalah manusia yang mampu menciptakan nilai baru melalui perkembangan teknologi dapat meminimalisir adanya kesenjangan pada manusia dan masalah ekonomi dikemudian hari. Memang rasanya sulit dilakukan di negara berkembang seperti Indonesia, namun bukan berarti tidak bisa dilakukan karena saat ini negara Jepang sudah membuktikannya sebagai negara dengan teknologi yang paling maju. (Sugiono, 2020)

Dengan menggunakan teknologi digital, bisnis dapat meningkatkan daya saing mereka sambil tetap bertahan dari serangan teknologi. Dengan memanfaatkan strategi digital marketing, maka biaya promosi dapat ditekan atau bahkan lebih dioptimalkan. Oleh karena itu, peran digitalisasi bisnis di masa pandemi covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian Indonesia khususnya untuk program-program pemerintah yang telah menggunakan sistem digital dan mendukung Usaha, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tak hanya itu, program dari



pemerintah dapat dikolaborasikan dengan *marketplace* maupun payment yang menggunakan *cashless* agar meminimalisir transaksi tunai dapat meningkatkan penyebaran virus covid-19. (Sulchan *et al.*, 2021)

Penyebaran covid-19 mendatangkan malapetaka pada tatanan sosial masyarakat. Pemerintah khususnya hanya berkonsentrasi mengatasi COVID-19 tanpa mempertimbangkan efek negatif pada tatanan sosial masyarakat khususnya sektor ekonomi UMKM. Hal ini terlihat dari berbagai upaya pemerintah untuk menahan penyebaran Covid-19. Langkah-langkah pemerintah yang bertujuan untuk menahan pandemi telah membatasi kontak fisik antar komunitas, yang mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi formal ataupun informal. Kebijakan pembatasan pergerakan dan keramaian dalam rangka menahan penyebaran COVID-19 berdampak langsung pada sektor ekonomi. Karena pada februari tahun 2020 covid-19 belum dinyatakan sebagai pandemi dunia, pemerintah Indonesia telah membuat strategi untuk mempersiapkan kemungkinan penyebaran covid-19 di tanah air. Pemerintah telah menangguhkan penerbitan bebas Visa Kunjungan dan Visa Kunjungan pada saat kedatangan melalui Permenkumham 7/2020. Undang-undang tersebut berlaku bagi orang-orang yang telah bertempat tinggal atau mengunjungi Republik Rakyat Tiongkok dalam waktu 14 hari sebelum memasuki Republik Indonesia. Akibat munculnya varian virus baru COVID-19, pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan perjalanan bagi warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun usaha pemerintah tidak membuahkan hasil positif justru memicu meluasnya penyebaran covid-19. Hal ini di karenakan masyarakat yang awalnya mendukung menjadi memberontak memilih untuk tidak mematuhi kebijakan aturan pemerintah demi kesejahteraan ekonomi individu dan keluarganya.

Sedangkan untuk masyarakat seperti buruh yang tetap mematuhi aturan pemerintah sehingga mereka menunggu dengan harapan meredanya virus covid-19 dan mampu untuk bekerja kembali. Harapan tersebut kandas di karenakan banyak usaha sektor ekonomi yang bangkrut tidak bisa membiayai biaya gaji karyawannya dan biaya lain lainnya. Efek negatifnya banyak sekali buruh, staf karyawan dan karyawati yang awalnya di rumahkan beralih status menjadi di PHK. Munculnya masalah ini menjadi salah satu persoalan penting yang harus segera di selesaikan pemerintah karena tingkat kemiskinan yang meningkat akibat PHK, memicu meningkatnya angka pengangguran di dalam negeri. Transformasi digital dibutuhkan untuk keberlanjutan bisnis. Pandemi Covid-19 telah mendorong transformasi digital yang lebih cepat dan memaksa perusahaan untuk mengubah dan mencari cara baru dalam menjalankan bisnis dan berinteraksi dengan konsumennya. Pimpinan perusahaan harus segera memulai dan memastikan kesuksesan dari transformasi digital tersebut. Infrastruktur back-end dan strategi pengelolaannya merupakan pondasi penting dalam kesuksesan transformasi digital. Keberlanjutan bisnis membutuhkan perubahan digital. pandemi Covid-19 telah mempercepat transformasi digital, memaksa bisnis untuk beradaptasi dan menemukan cara baru untuk menjalankan bisnis dan terhubung dengan pelanggan mereka. Transformasi digital harus segera dimulai dan dipastikan berhasil. Untuk transformasi digital yang sukses, infrastruktur back-end dan strategi manajemen adalah fondasi penting. (Bangun, 2021)

Dari PSBB 2020 Sampai PPKM 2021

Aturan baru kebijakan Pemerintah dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada tahun 2020 yang berubah ke Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada tahun 2021 sampai saat ini tidak begitu berdampak signifikan terhadap pemulihan ekonomi. Menteri Dalam Negeri menetapkan PPKM dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021. Pada tanggal 11-25 Januari 2021, kebijakan PPKM diadopsi sesuai dengan pengetatan peraturan kesehatan di beberapa wilayah seJawa-Bali yang kemudian diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Yang awalnya hanya PPKM, Kemudian berstatus PPKM Mikro, PPKM Darurat hingga saat ini berubah status menjadi PPKM Level 4, penerapan PPKM level 4 ini di lapangan tidak begitu berdampak karena jika masyarkat terlalu di tekan maka akan menimbulkan pemberontakan massal dalam sejumlah wilayah sehingga akan meningkatkan jumlah kasus Covid-19. Tentu saja ini akan memicu peningkatan angka penyebaran pandemi covid-19. Suasana yang memanas antara masyarakat kecil yang menjalankan usahanya dengan pihak berwajib yang melaksanakan aturan dari kebijakan pemerintah membuat beberapa oknum sampai tega melakukan beberapa tindakan kekerasan. Hal ini kembali justru tidak menyelesaikan masalah namun menambah buruk keadaan karena masyarakat semakin tidak mau untuk mentaati segala aturan yang ada. (Sibuea, 2021)

LANDASAN TEORI

a. Digitalisasi Bisnis

Istilah "digital" berasal dari kata Latin digitus, yang diterjemahkan sebagai "jari." Sejak abad ke-15, istilah "digit" telah digunakan untuk merujuk pada alat untuk mengukur panjang suatu benda. (Mulyadi : 2007) Kemajuan lebih lanjut mengakibatkan munculnya istilah digital, yang mengacu pada segala sesuatu yang memiliki nilai numerik atau numerik. Ini kemudian digunakan oleh fisikawan untuk menandakan ada atau tidak adanya arus listrik dalam transmisi, menciptakan apa yang dikenal sebagai



sinyal digital yang bertindak seperti gelombang. Dengan demikian, istilah "digital" dapat merujuk pada gelombang, jaringan, atau internet yang terhubung melalui komputer. Sedangkan frasa "zaman digital" mengacu pada perkembangan teknologi digital berbasis internet, terutama teknologi informasi komputer.

Digitalisasi bisnis adalah jenis perusahaan yang paling maju saat ini, dan diperkirakan akan terus tumbuh dari tahun ke tahun dan meningkat secara signifikan dari waktu ke waktu. Perusahaan semacam ini menempatkan premium pada platform berbasis internet seperti e-commerce dan e-business. Bisnis yang menggunakan media internet melampaui batasan e-commerce tradisional dengan memungkinkan jaringan elektronik dapat diakses melalui komputer pribadi biasa melalui infrastruktur telekomunikasi yang telah disiapkan. (Mark V : 2011) Memanfaatkan internet, khususnya browser, murah, sederhana, dan sangat fleksibel untuk berbagai kebutuhan perusahaan. Selain itu, browser memiliki fitur yang berbeda dan kompatibel dengan berbagai sistem komputer.

Digitalisasi bisnis mengharuskan bisnis menetapkan strategi pemasaran yang tepat dalam menanggapi perubahan ini. Strategi pemasaran digital adalah salah satu upaya untuk mempromosikan suatu merek melalui penggunaan media digital yang dapat menghubungi pelanggan secara real time, secara personal, dan dengan informasi yang relevan. Subkategori pemasaran digital ini mencakup sejumlah besar metode dan aktivitas yang ditemukan dalam payung pemasaran internet. Selain itu, pemasaran digital menggabungkan aspek psikologis, humanis, antropologis, dan teknis, menghasilkan pengembangan media baru dengan kemampuan interaktif dan multimedia yang luas. Interaksi antara produsen, perantara pasar, dan konsumen adalah hasil dari zaman baru.

b. Pemulihan Ekonomi

Pemulihan ekonomi merupakan upaya dalam melakukan pengaturan baik pedesaan dan perkotaan dengan tujuan mewujudkan sebuah pendekatan berbasis wilayah untuk meningkatkan permintaan dan penawaran dari pasar yang terpengaruh. Dalam waktu dekat, pemulihan ekonomi berusaha untuk secara progresif mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal melalui pekerjaan sementara dan pendapatan yang lebih tinggi. Pemulihan ekonomi berusaha untuk menyediakan keadaan endogen bagi ekonomi lokal untuk menghidupkan kembali dan menghasilkan lapangan kerja dalam jangka panjang. (Francesca Battistin: 2010)

Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa pemulihan ekonomi sangat penting bagi eksistensi masyarakat. Bahkan dalam jangka pendek maupun panjang, sebagai sarana pemulihan ekonomi, disarankan agar masyarakat tidak terlalu bergantung pada bantuan pemerintah. Hal ini karena akan menimbulkan efek ketergantungan, menghambat kemajuan masyarakat dan bangsa dari peningkatan kesejahteraan ekonomi Indonesia. Dalam keadaan sulit, seperti bencana atau perang, salah satu hambatan paling signifikan untuk pemulihan ekonomi adalah terbatasnya daya beli penduduk setempat yang membeli produk dan jasa yang dijual untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kesulitan lain adalah karena kemiskinan, pasar asing dan pasar yang lebih menguntungkan jarang dapat diakses (Francesca Battistin: 2010).

Sebagai hasil dari hipotesis yang diuraikan di atas, jelas bahwa keadaan yang diciptakan oleh suatu kejadian atau peristiwa akan membuat individu tidak mampu melakukan transaksi jual beli yang tepat. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya daya beli masyarakat setempat, baik dari segi produk maupun jasa. Akibatnya, pangsa pasar di industri yang berbeda akan berpengaruh satu sama lain. Ketika salah satu sektor mengalami kesulitan, kemungkinan besar akan berdampak pada sektor-sektor yang berdekatan.

c. Prinsip prinsip pemulihan ekonomi

Pemulihan ekonomi merupakan komponen penting dari Kebijakan PBB untuk Menciptakan Ekonomi yang Kondusif di suatu negara, terutama di negara yang baru saja mengalami insiden atau konflik. Semua program dan intervensi yang ditujukan untuk pemulihan ekonomi harus berpegang pada lima prinsip komprehensif, antara lain: Koheren dan Komprehensif, Menghindari Masalah, Peka Terhadap Masalah, Bertujuan Untuk Keberlanjutan(Francesca Battistin: 2010). Pemulihan ekonomi memerlukan berbagai pendekatan, antara lain seperti strategi yang berpusat pada properti milik lokal atau daerah, pengambilan keputusan yang inklusif, pendekatan berbasis permintaan untuk kebangkitan pasar, meminimalkan distorsi pasar, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya/daerah lokal, dan memanfaatkan koneksi (Francesca Battistin: 2010).

d. Pengangguran



Pengangguran merupakan orang-orang yang sekarang menganggur dan secara aktif mencari pekerjaan. Orang-orang yang menganggur seringkali adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan sesuai usia dan durasi kerja. Usia kerja sering diartikan sebagai tidak sekolah tetapi lebih tua dari usia anak (relatif di atas 6-18 tahun, yaitu masa pendidikan dari SD sampai tamat SMA). Sementara itu, siswa di atas usia 18 tahun dapat digolongkan sebagai pengangguran, meskipun banyak yang terus memperdebatkannya. (Amirudin I:2016)

Pengangguran (unemployed): Kategori ini mencakup mereka yang tidak lagi bekerja tetapi masih mencari pekerjaan atau sedang menunggu untuk dipanggil kembali bekerja oleh majikan mereka. Dengan demikian, menurut pernyataan lain, seseorang dianggap menganggur jika ia tidak bekerja dan telah aktif mencari pekerjaan selama (empat) minggu terakhir, jika ia baru saja dipecat dari pekerjaan dan sedang menunggu panggilan kembali, atau jika ia sekarang sedang bekerja. menyusun surat lamaran kerja selama satu bulan ke depan. Untuk memenuhi syarat sebagai anggota kelompok ini, cukup dengan memikirkannya, atau mempertimbangkan gagasan untuk menerbitkan buku, misalnya. Untuk menerapkan, seseorang harus menunjukkan inisiatif dan perusahaan. (paul A: 1998)

Pengangguran adalah penyakit sosial yang disebabkan oleh kurangnya pekerjaan atau ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan. (ignas K :2004)Pengangguran juga muncul ketika tenaga kerja tidak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap output sosial kotor masyarakat. Istilah "pengangguran" sering digunakan untuk menyebut angkatan kerja yang belum bekerja atau sedang bekerja secara tidak efisien. Pengangguran adalah masalah ekonomi makro yang paling serius karena berdampak langsung pada masyarakat. (Amirudin I :2016)Bagi sebagian besar individu, kehilangan pekerjaan berarti penurunan kualitas hidup dan tekanan psikologis. Pengangguran tidak akan pernah bisa diberantas sepenuhnya, karena terlepas dari kapasitas luar biasa bangsa untuk mengelola ekonominya, selalu ada aplikasi. Namun, aliran klasik, yang teorinya yang paling terkenal adalah Hukum "Katakan" Jean Baptiste Say, yang menyatakan bahwa "penawaran menghasilkan permintaannya sendiri," berpendapat bahwa jika ini benar, gerakan itu tidak akan ada dan, jika memang demikian, akan terjadi. tidak berlanjut lama, karena akan rebound. Mekanismenya sederhana: jika produsen menciptakan sejumlah produk tertentu, pada akhirnya akan dikonsumsi oleh publik.

Pengangguran selalu menjadi masalah, bukan hanya karena pihak-pihak yang menghamburhamburkan uang, tetapi juga karena memiliki efek sosial yang negatif, yang jika saya tidak salah, akan mengakibatkan peningkatan perilaku ilegal dan moral. Di sisi lain, pengangguran atau setengah pengangguran biasanya bersifat sukarela, baik karena pemilihan pekerjaan, menunggu pekerjaan yang cocok, atau berhenti dari pekerjaan lama untuk mencari pekerjaan baru karena kebosanan, kebosanan, atau ketidakmampuan untuk bekerja, di antara alasan lainnya. (Iskandar P: 2015)

Pengangguran diklasifikasikan menjadi dua jenis berdasarkan alasan terjadinya. (T Gilarso: 2004) Jenis pertama adalah pengangguran friksional. Salah satu penyebab pengangguran adalah mencocokkan orang dengan pekerjaan membutuhkan waktu. Karyawan memiliki minat dan keterampilan yang berbeda-beda, dan pekerjaan menunjukkan sifat yang berbeda-beda. Sementara itu, arus informasi tentang calon karyawan dan lowongan pekerjaan tidak lancar, dan mobilitas pekerja tidak instan. Untuk semua alasan ini, memilih pekerjaan yang tepat membutuhkan waktu dan usaha, yang cenderung menurunkan tingkat pertumbuhan pekerjaan.

METODE PENELITIAN

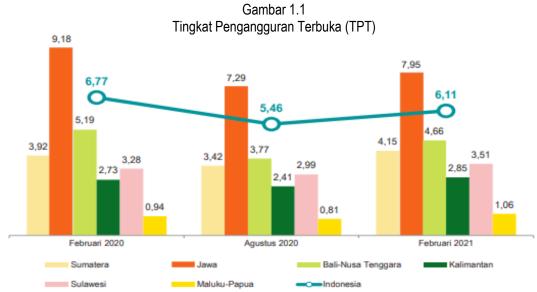
Penelitian yang digunakan dengan metode *literatur review* dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang menggunakan data tulis maupun lisan,serta peristiwa-peristiwa, pengetahuan atau proyek studi yang bersifat deskriptif. Data sekunder data yang diperoleh melalui studi literatur berupa buku untuk mencari teori yang relevan dengan penulisan ini dan jurnal karya ilmiah digunakan untuk mempelajari karya ilmiah yang berkaitan dengan peran digitalisasi bisnis untuk meminimalisir pengangguran di Indonesia. Adapun data sekunder lainnya untuk mendukung penelitian ini yakni majalah dan *internet* berupa jurnal *online* dan berita yang berkaitan dengan digitalisasi bisnis berkaitan dengan UMKM yang terdampak pandemi covid-19. Teknik analisis data yang digunakan analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan saat proses pengumpulan data sedang berlangsung, dan setelah itu dilakukan untuk pengumpulan data dalam periode tertentu. (Prof. Dr. Sugiyono, 2016)

HASIL DAN PEMBAHASAN



a. Tingkat Pengangguran di Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat 8,75 juta orang menganggur pada Februari 2021. Jumlah ini naik 1,82 juta orang dibandingkan Februari 2020 yang sebesar 6,93 juta.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator dalam ukuran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dan menunjukkan bagaimana penawaran tenaga kerja kurang dimanfaatkan. TPT dari hasil Sakernas Februari 2021 menunjukan angka sebesar 6,26 persen. Ini menyiratkan bahwa ada sekitar enam orang yang menganggur untuk setiap 100 orang di angkatan kerja. TPT meningkat 1,32 poin persentase pada Februari 2021 dibandingkan Februari 2020, namun turun 0,81 poin persentase pada Agustus 2020. Dari Februari 2020, yang sebesar 69,21 persen, angka partisipasi angkatan kerja (TPAK) dilaporkan turun menjadi 68,08 persen . Namun, dibandingkan Agustus 2020 yang sebesar 67,77 persen, situasi ini membaik. Sementara itu, individu yang dipekerjakan secara resmi mencapai 40,38 persen dari keseluruhan angkatan kerja. Sementara itu, individu yang bekerja paruh waktu mencapai 59,62 persen dari angkatan kerja. Bahkan ketika jam kerja diperhitungkan, 84,14 juta orang bekerja penuh waktu, atau setidaknya 35 jam setiap minggu. Setelah itu, 46,92 juta orang bekerja selama 1 hingga 34 jam. (Badan Pusat Statistik, 2021)

Sebagai insentif, pemerintah telah memberikan uang tunai sebesar Rp 4,9 triliun kepada peserta Program Kartu Prakerja. Kunci sukses Program Kartu Prakerja, menurut Menko Airlangga, bukan hanya penyelenggara atau besaran uang yang diberikan pemerintah, tetapi juga perubahan positif yang terjadi pada pengguna Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan bagi pencari kerja, pekerja/buruh yang kehilangan pekerjaan, dan/atau pekerja/buruh yang perlu ditingkatkan keterampilannya, termasuk pemilik usaha mikro dan kecil. Inisiatif ini merupakan bentuk kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam melayani masyarakat dengan semangat gotong royong untuk peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja dan pekerja/buruh yang perlu ditingkatkan keterampilan kerjanya, seperti pekerja/buruh yang diberhentikan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil, semuanya berhak mendapatkan Kartu Prakerja. Program Kartu Prakerja diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang diberhentikan serta pelaku usaha mikro dan kecil yang mata pencahariannya terdampak wabah COVID-19. (Kurniasih Miftakhul Jannah, 2020)

b. Peran Pemerintah dalam Meminimalisir Pengangguran

Grafik 1.2 Peserta Kartu Pra Kerja





Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020 (data diolah)

Jika dilihat dari grafik diatas, maka dapat disimpulkan bahwa peserta kartu prakerja tertinggi dari kategori peserta yang bekerja namun pendapatan menurun maka dari itu, mereka mengikuti pelatihan prakerja. Dari kategori pengangguran memiliki 22,24% lebih kecil dibandingkan dengan pekerja yang pendapatannya menurun. Sedangkan dari kategori bukan angkatan kerja hanya 11,29% sangat kecil dibandingkan dengan pengangguran dan pekerja yang pendapatannya menurun. Jadi, diharapkan dari program kartu prakerja ini dimanfaatkan dengan baik oleh para pengangguran maupun korban dari putus kerja atau Putus Hubungan Kerja (PHK).

Berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2020 menunjukkan bahwa mayoritas penerimaan kartu Prakerja menyatakan program tersebut meningkatkan keterampilan kerja mereka. Sebanyak 88,9% penerimaan kartu prakerja yang menyelesaikan pelatihan mengatakan program kartu Prakerja meningkatkan keterampilan. Beberapa manfaat yang diperoleh dari program kartu prakerja yaitu; (1) mendapatkan pelatihan sesuai dengan keinginan, (2) memperoleh bantuan langsung tunai atau insentif, (3) membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan, (4) mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan, (5) mendorong pekerjaan seseorang melalui pengurangan ketidakcocokan antara SDM yang dibutuhkan dengan penyedia kerja, (6) menjadi komplemendari pendidikan formal, dan (7) memberikan nilai tambah bagi peserta program, sekaligus memberikan nilai bagi sektor swasta. (Badan Pusat Statistik, 2021)

Peserta yang telah mengikuti pelatihan yang diminati nantinya akan mendapatkan sertifikat keahlian yang sesuai. Peserta kartu prakerja bisa melampirkan sertifikat tersebut saat melamar pekerjaan untuk menambah penilaian dari perusahaan. Selain itu, terdapat pelatihan untuk usaha mikro agar peserta dapat membuka usaha nantinya setelah melakukan pelatihan prakerja. Pelatihan kartu prakerja dilakukan secara online dengan memanfaatkan digitalisasi dan platform digital dan puluhan lembaga pelatihan yang menjalin kerjasama dengan kartu prakerja.

c. Peran E-Commerce atau Digitalisasi Bisnis dalam Meminimalisir Pengangguran



Bentuk Transformasi dan Pemanfaatan Ekonomi Digital



Sumber: KOMINFO, 2020

Secara umum, ekonomi digital di Indonesia terdiri dari e-commerce, on demand service, digital wellness service, fintech, dan IoT. Dari kelima platform tersebut memiliki fungsi masing-masing dimana terdapat peluang besar bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya, terlebih bagi para start-up yang baru saja memulai bisnisnya dapat menjadi reseller maupun droshiper agar dapat meminimalisir modal usaha. E-commerce adalah perusahaan atau usaha menawarkan untuk transaksi atau memfasilitasi penjualan produk dan jasa secara e-commerce selanjutnya menimbulkan e-purchasing dan e-marketing. E purchasing berarti perusahaan memutuskan membeli barang, jasa, dan informasi dari berbagai pemasok online. E-purchasing yang cerdas sudah menghemat jutaan dolar uang perusahaan. E-marketing menggambarkan usaha perusahaan untuk memberitahu pembeli, mengomunikasikan, mempromosikan, dan menjual produk dan jasa lewat internet. (HELMALIA and AFRINAWATI, 2018)

Pandemi Covid-19 telah memberikan efek domino multisektoral (kesehatan, sosial, ekonomi, keuangan). Namun aktivitas ekonomi harus terus berjalan dengan tetap memperhatikan faktor kesehatan. Ekonomi digital juga punya ruang berkembang dan menciptakan level *playing fields* yang sama untuk semua orang. Selain itu, ekonomi digital ikut mendorong inklusi sehingga seseorang bisa mendapatkan layanan tanpa harus bertatap muka. Bahkan sebelum wabah Covid-19, e-commerce telah menarik banyak pelanggan di Indonesia. E-commerce juga menjadi salah satu alasan utama mengapa Indonesia memiliki ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai \$40 miliar pada 2019 dan perkiraan \$130 miliar pada 2025. Nilai transaksi e-commerce di Indonesia tumbuh sebesar 63,36 persen menjadi Rp 186,75 triliun pada paruh pertama tahun 2021. Banyaknya transaksi e-commerce mencerminkan pentingnya digitalisasi UMKM, terutama mengingat seberapa cepat ekonomi dan keuangan digital berkembang di tengah COVID-19. Pembelian online dan penggunaan uang elektronik mendorong digitalisasi perusahaan, yang menjadi lebih populer di kalangan masyarakat umum selama pandemi COVID-19. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran selama epidemi Covid-19, yang masih terjadi karena PHK yang berkelanjutan oleh bisnis yang mengurangi tenaga kerja mereka. (Firmansyah, 2018)

Terdapat konsep *society* 5.0 yang menyatakan bahwa kebutuhan pengguna teknologi dapat terpenuhi sesuai dengan masalahnya. Dengan kata lain, konsep *co-creation* akan memungkinkan suatu produk/konten dihasilkan dengan menyesuaikan permasalahan dari pengguna teknologi. Berdasarkan berbagai gagasan sebelumnya, proses penciptaan konten digital dalam *society* 5.0 menekankan pada kemampuan teknologi dalam membangun jejaring dengan berbagai pengguna sehingga suatu produk/konten dapat tercipta dari kreativitas dan inovasi secara kolektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kehadiran teknologi harus mampu menghasilkan efektivitas dan mendukung interaktivitas bagi kegiatan kolaborasi dan *co-creation*. Manusia sebagai pembuat konten tidak dapat dilepaskan dari proses penciptaan konten digital karena konten digital merupakan bagian dari industri kreatif yang membutuhkan kreativitas manusia. Para pekerja konten digital memerlukan perpaduan keahlian antara



teknologi dengan kreativitas budaya sehingga profesi ini memiliki perbedaan dengan pekerja dari bidangbidang teknis yang tidak menitikberatkan pada kreativitas. (Sugiono, 2020)

KESIMPULAN

Pemerintah berupaya semaksimal mungkin dalam meminimalisir terjadinya peningkatan penggangguran. Pemerintah sudah memaksimal upayanya dalam menggelontorkan dana sebanyak 4,9 miliar dengan harapan masyarakat yang menganggur, bukan pekerja tetap atau korban phk mampu bangkit dan memulai kembali dari awal dengan membuat usaha dengan cara mendaftarkan diri dengan mengikuti pra kerja. Pemerintah sudah memberikan stimulus semaksimal mungkin mulai dari bantuan dana dari pra kerja sampai dengan pelatihan pelatihan yang di harapkan mampu memberikan manfaat bagi penganggurang terdampak pandemi covid 19. Dengan berkembangnya teknologi, ekonomi digital saat ini sudah cukup banyak sekali sehingga banyak pengangguran mulai merintis usahanya dengan bermodal bantuan dari pemerintah memulai dari membuat toko online sampai memperomosikan usahanya menggunakan media online yang tersedia. dengan harapan mampu untuk memulihkan kembali pendapatan mereka dan mampu meningkat sektor ekonomi dalam hal umkm mikro.

DAFTAR PUSTAKA

Battistin,Francesca,2010,Local Economic Recovery In Post-Conflict,Swiss Geneva: ILO Publication Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1988. Ekonomi Edisi Keduabelas, terj. Jaka Wasana. Jakarta: Penerbit Erlanga

Idris, Amiruddin. 2016. Ekonomi Publik. Yogyakarta: DEEPUBLISH

Kleden, Ignas. 2004 Masyarakat dan Negara: Sebuah Persoalan. Magelang: Yayasan INDONESIATERA

Putong, Iskandar. 2015. Ekonomi Makro: Pengantar untuk Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Makro. Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong

Gilarso, T. 2004. Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. Yogyakarta: Kanisius

Mulyadi. 2007. Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen: Sistem Pelipatganda Kinerja Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat

Vernon, Mark. 2011. Bisnis: The Key Concepts. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Badan Pusat Statistik (BPS) (2021) 'Februari 2021: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,26 persen', *Bps.Go.Id*, 19(37), p. https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1815.

Bangun, R. H. (2021) 'Disparitas Pembangunan Manusia Di Sumatera Utara', *Jurnal Akuntansi & Ekonomi FE UN PGRI Kediri*, (2021). doi: 10.29407/jae.v6i1.14389.

Firmansyah, A. (2018) 'Kajian Kendala Implementasi E-Commerce Di Indonesia', *Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 8(2), p. 127. doi: 10.17933/mti.v8i2.107.

HELMALIA, H. and AFRINAWATI, A. (2018) 'Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Padang', *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, 3(2), p. 237. doi: 10.15548/jebi.v3i2.182.

Kurniasih Miftakhul Jannah (2020) 'Fakta Bantuan UMKM Rp2,4 Juta', https://economy.okezone.com/.

Prof. Dr. Sugiyono (2016) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. ALFABETA Bandung.

Sibuea, H. Y. P. (2021) 'Penegakan Hukum Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa dan Bali', *Info Singkat*, XIII, pp. 1–6. Available at: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIII-13-I-P3DI-Juli-2021-215.pdf.

Sugiono, S. (2020) 'Industri Konten Digital dalam Perspektif Society 5 . 0 Digital Content Industry in Society 5 . 0 Perspective', *Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Komunikasi*, 22(2), pp. 175–191.

Sulchan, M. et al. (2021) 'Analisis Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Stimulus Ekonomi Terhadap UMKM Terdampak Pandemi COVID-19', *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 6(1), pp. 85–91. doi: 10.29407/jae.v6i1.14954.